

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Eks Karesidenan Madiun

Karesidenan merupakan pembagian administratif menjadi kedalam sebuah provinsi yang dulu dilakukan di Indonesia atau dahulu disebut Hindia Belanda yang digunakan hingga sekitar tahun 1950-an. Ketika masih zaman Hindia Belanda sebuah karesidenan (*regentschappen*) terdiri atas beberapa kabupaten (*afdeeling*). Tidak di semua provinsi di Indonesia pernah ada karesidenan. Hanya di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok dan Sulawesi. Biasanya ini daerah-daerah yang penduduknya banyak.

Kata karesidenan berasal dari Bahasa Belanda *Residentie*. Sebuah karesidenan dikepalai oleh residen, yang berasal dari Bahasa Belanda *Resident*. Di atas residen adalah gubernur jenderal, yang memerintah atas nama Raja dan Ratu Belanda.

Semenjak krisis yang terjadi pada tahun 1950-an, sudah tidak ada karesidenan lagi sehingga pemerintahan yang ada hanya kabupaten. Namun, sebutan "eks-karesidenan" masih dipakai secara informal. Sisa sejarah karesidenan adalah pembagian wilayah untuk pemakaian tanda kendaraan bermotor (pelat nomor). Pembagiannya, Pelat nomor terutama di pulau Jawa masih banyak berdasarkan karesidenan.

Eks Karesidenan Madiun merupakan salah satu dari 16 karesidenan yang terletak dibagian barat daya Provinsi Jawa Timur. Eks Karesidenan madiun dibatasi oleh Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro disebelah utara, Kabupaten Nganjuk dibagian timur, Samudra Hindia dibagian selatan dan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagian Barat.

Eks Karesidenan Madiun terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun.

1. Kabupaten Pacitan

Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kabupaten Pacitan terletak di koordinat: $110^{\circ} 90'$ sampai $111^{\circ} 43'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 92'$ sampai $8^{\circ} 29'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 396 jiwa/ km^2 dan luas wilayah sebesar 1.389,87 km^2 Kabupaten Pacitan memiliki populasi sebesar 550.986 jiwa (BPS Pacitan, 2016).

2. Kabupaten Ponorogo

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kabupaten Ponorogo

terletak di koordinat: 111° 7' sampai 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' sampai 8° 20' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 632 jiwa/ km² dan luas wilayah sebesar 1.371,78 km² Kabupaten Ponorogo memiliki populasi sebesar 867.393 jiwa (BPS Ponorogo, 2016).

3. Kabupaten Madiun

Madiun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kabupaten Madiun terletak di koordinat: 111° 25' sampai 111° 51' Bujur Timur dan 7° 12' sampai 7° 48' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Madiun terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 669 jiwa/ km² dan luas wilayah sebesar 1.010,86 km² Kabupaten Madiun memiliki populasi sebesar 676.087 jiwa (BPS Madiun, 2016).

4. Kabupaten Magetan

Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kabupaten Magetan terletak di koordinat: 111° 10' sampai 111° 30' Bujur Timur dan 7° 30' sampai 7° 47' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 147 desa dan 88 kelurahan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 938,06 jiwa/ km² dan

luas wilayah sebesar 668,84 km² Kabupaten Magetan memiliki populasi sebesar 627.413 jiwa (BPS Magetan, 2016).

5. Kabupaten Ngawi

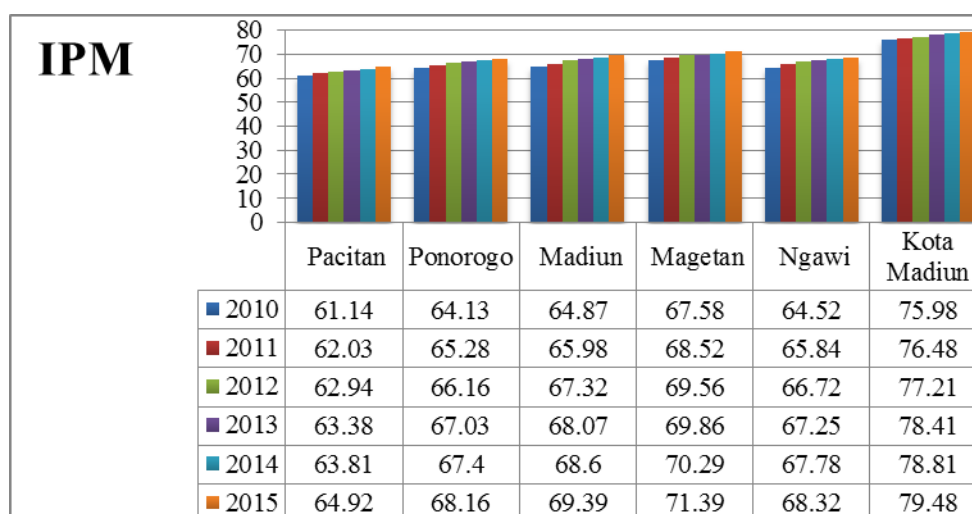
Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kabupaten Ngawi terletak di koordinat: 110° 10' sampai 111° 40' Bujur Timur dan 7° 21' sampai 7° 31' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 217 desa/kelurahan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 639,5 jiwa/ km² dan luas wilayah sebesar 1.295,98 km² Kabupaten Ngawi memiliki populasi sebesar 828.783 jiwa (BPS Ngawi, 2016).

6. Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang termasuk bagian dari eks Karesidenan Madiun. Kota Madiun terletak di koordinat: 111° 23' sampai 111° 31' Bujur Timur dan 7° 37' sampai 7° 48' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan yang terdiri dari 27 kelurahan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 5.266 jiwa/ km² dan luas wilayah hanya sebesar 33,23 km² Kota Madiun memiliki populasi sebesar 174.995 jiwa (BPS Kota Madiun, 2016).

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) / *human development index* (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang diukur berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan secara ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, IPM kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Jatim

Gambar 4. 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun

IPM di setiap wilayah Eks Karesidenan Madiun setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini terlihat pada gambar di atas. IPM Kota Madiun masuk dalam kategori tinggi dan merupakan wilayah dengan IPM terbesar di wilayah Eks Karesidenan Madiun yakni dengan IPM sebesar 79,48. Selanjutnya IPM Kabupaten Magetan juga masuk dalam

kategori tinggi dan merupakan IPM terbesar kedua di wilayah Eks Karesidenan Madiun dengan IPM sebesar 71,39. Sedangkan IPM Kabupaten Madiun masih masuk dalam kategori sedang dengan IPM sebesar 69,39. Kemudian IPM Kabupaten Ngawi masuk dalam kategori sedang dengan IPM sebesar 68,32. Diikuti IPM Kabupaten Ponorogo yang juga masuk dalam kategori sedang dengan IPM sebesar 68,16. Sedangkan IPM Kabupaten Pacitan juga masih masuk dalam kategori sedang dan merupakan wilayah dengan IPM terkecil di wilayah Eks Karesidenan Madiun dengan IPM sebesar 64,92. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Madiun, dengan tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang handal akan dapat mendorong kemajuan perekonomian di wilayah Eks Karesidenan Madiun.

Tabel 4. 1
Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015 (Tahun)

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	70,42	70,51	70,61	70,70	70,75	71,05
Kabupaten Ponorogo	71,62	71,70	71,78	71,85	71,88	72,08
Kabupaten Madiun	69,38	69,49	69,59	69,70	69,76	70,36
Kabupaten Magetan	71,62	71,71	71,79	71,87	71,91	72,01
Kabupaten Ngawi	71,01	71,10	71,19	71,28	71,33	71,53
Kota Madiun	72,23	72,27	72,33	72,38	72,41	72,41

Sumber: BPS Jatim, 2016

Tabel 4. 2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun
Tahun 2010-2015 (Tahun)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	11,01	11,03	11,35	11,41	11,61	11,94
Kabupaten Ponorogo	12,10	12,33	12,56	12,80	13,04	13,29
Kabupaten Madiun	11,59	11,65	12,06	12,53	12,79	13,10
Kabupaten Magetan	12,40	12,42	12,54	12,57	12,77	13,60
Kabupaten Ngawi	11,43	11,73	11,96	12,18	12,29	12,31
Kota Madiun	12,42	12,44	12,56	13,33	12,64	14,06

Sumber: BPS Jatim, 2016

Tabel 4. 3
Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Eks Karesidenan Madiun Tahun
2010-2015 (Tahun)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	6,00	6,10	6,21	6,32	6,64	6,88
Kabupaten Ponorogo	6,12	6,45	6,57	6,86	6,91	6,96
Kabupaten Madiun	6,13	6,43	6,74	6,74	6,89	6,99
Kabupaten Magetan	7,12	7,23	7,33	7,43	7,55	7,65
Kabupaten Ngawi	5,82	6,19	6,23	6,27	6,52	6,53
Kota Madiun	10,32	10,50	10,68	10,86	10,90	11,08

Sumber: BPS Jatim, 2016

Tabel 4. 4
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan
Madiun 2010-2015 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	6.775	7.232	7.496	7.626	7.656	7.686
Kabupaten Ponorogo	7.537	7.849	8.188	8.354	8.383	8.654
Kabupaten Madiun	9.416	9.995	10.429	10.625	10.667	10.710
Kabupaten Magetan	8.961	9.635	10.375	10.484	10.539	10.594
Kabupaten Ngawi	9.003	9.388	9.905	10.105	10.143	10.584
Kota Madiun	13.455	13.799	14.317	14.604	14.643	14.723

Sumber: BPS Jatim, 2016

Dari tabel diatas terbukti terjadi kenaikan semua komponen pembentuk IPM dalam lima tahun terakhir. Komponen-komponen pembentuk IPM adalah kesehatan yang diukur menggunakan angka harapan hidup saat lahir, pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, standar hidup layak dengan menggunakan pengeluaran per kapita.

C. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, jumlah penduduk miskin disuatu daerah juga berbeda-beda. Jumlah penduduk miskin yang dimaksud ini adalah merupakan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Tabel di bawah ini menunjukkan besaran jumlah penduduk miskin di wilayah Eks Karesidenan Madiun menurut kabupaten/kota.

Tabel 4. 5
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015 (Jiwa)

Kabupaten / Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	105.400	98.747	94.459	91.719	88.940	92.080
Kabupaten Ponorogo	113.000	105.867	101.420	103.010	99.860	105.600
Kabupaten Madiun	102.300	95.840	91.780	83.700	81.200	84.740
Kabupaten Magetan	80.200	75.040	71.820	76.330	73.970	71.160
Kabupaten Ngawi	149.200	137.840	131.650	127.490	123.180	129.300
Kota Madiun	10.421	9.744	9.298	8.740	8.480	8.550

Sumber: BPS Jatim 2016

Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun cenderung berfluktuatif, tapi cenderung mempunyai tren negatif setiap

tahunnya. Namun hal berbeda terlihat pada tahun 2015, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin hampir disetiap kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun, kecuali Kabupaten Magetan yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskinnya. Kabupaten Ngawi merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 129.300 orang, meningkat 6200 orang dari tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Ponorogo terbesar kedua dengan jumlah penduduk miskin sebesar 105.600 orang. Diikuti Kabupaten Pacitan dengan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 92.080 orang, Kabupaten Madiun dengan jumlah penduduk miskin sebesar 84.740, Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 71.160. Sedangkan Kota Madiun merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terkecil di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8.550 orang. Jumlah penduduk miskin yang termasuk besar ini merupakan salah satu masalah dalam pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Madiun.

Tabel 4. 6
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (Rupiah)

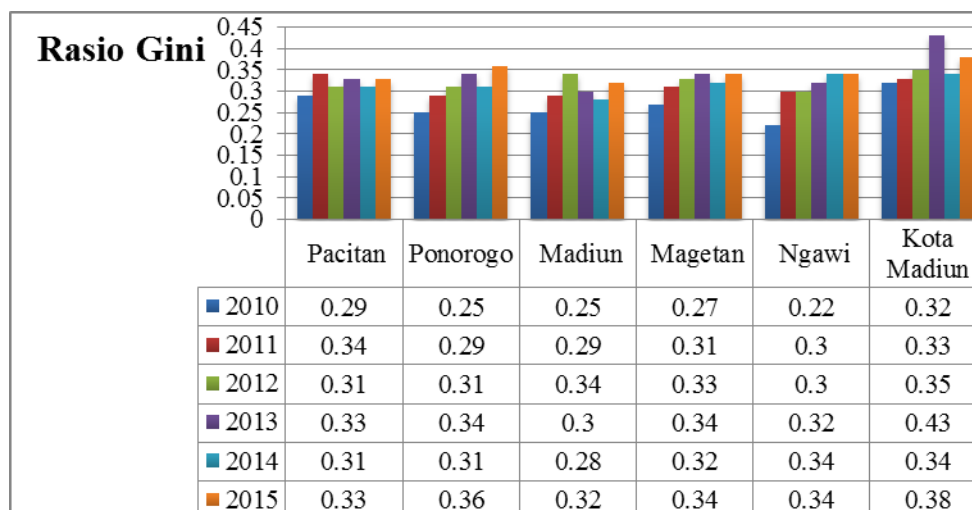
Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pacitan	203.979	215.482	220.810	228.573
Kabupaten Ponorogo	229.337	239.963	247.368	-
Kabupaten Madiun	240.798	256.567	265.310	-
Kabupaten Magetan	236.801	253.040	262.069	272.972
Kabupaten Ngawi	220.560	233.596	247.800	-
Kota Madiun	288.368	320.210	338.609	359.771
Jawa Timur	243.783	243.783	289.945	316.464

Sumber: BPS Jatim, 2016

Sedangkan garis kemiskinan merupakan batasan terendah atau yang setara dengan nilai pengeluaran yang digunakan rumah tangga minimum untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Garis kemiskinan merupakan batasan pengeluaran minimum rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, jika pengeluaran di bawah garis kemiskinan maka rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori miskin. Dari tabel diatas terlihat bahwa garis kemiskinan juga mengalami kenaikan setiap tahun.

D. Rasio Gini

Penghitungan dengan menggunakan indeks gini memiliki rasio antara 0 dan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, diperoleh indeks gini di kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun yang digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Jatim 2016

Gambar 4. 2

Rasio Gini Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Madiun Tahun 2010-2015

Gambar diatas menunjukan tingkat rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun terlihat bahwa tingkat rasio gini masih berada dalam ambang atau kategori normal. Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang diukur menggunakan indikator rasio gini menunjukkan rasio gini kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun berada dalam kategori rendah. Tetapi meskipun begitu terlihat bahwa tren rasio gini berfluktuatif dan cenderung meningkat, bukan berarti dalam beberapa tahun kedepan rasio gini kabupaten/kota di Eks Karesidenan Madiun dapat masuk dalam kategori sedang jika rasio gini sudah naik melewati 0,4. Kota Madiun merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan distribusi yang pernah masuk pada kategori sedang pada tahun 2013 dengan rasio gini sebesar 0,43. Rasio gini Kota Madiun sekarang juga masih merupakan yang terbesar yaitu sebesar 0,38, diikuti oleh Kabupaten Ponorogo mencapai 0,36, kemudian Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan dengan rasio gini mencapai 0,34,

Kabupaten Pacitan sebesar 0,33 sedangkan Kabupaten Madiun yang terendah dengan 0,32. Kenaikan Rasio Gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan meskipun masih dalam kategori yang rendah. Peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat menaikkan jumlah penduduk miskin yang dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Madiun.

E. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum kabupaten/kota merupakan upah minimum yang setiap tahun berubah berdasarkan peraturan gubernur pada tiap provinsi. Penetapan upah minimum kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk menetapkan formula upah yang realistis, sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota, Dewan Penguapahan Provinsi serta pertumbuhan dan perkiraan inflasi pada tiap tahun disetiap kabupaten/kota. Penetapan upah minimum di setiap kabupaten/kota merupakan upaya pemerintah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja agar mendorong peningkatan produktifitas. Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur setiap tahun didapatkan upah minimum kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	UMK
1.	Kota Surabaya	Rp.2.710.000,00
2.	Kabupaten Gresik	Rp.2.707.500,00
3.	Kabupaten Sidoarjo	Rp.2.705.000,00
4..	Kabupaten Pasuruan	Rp.2.700.000,00
5.	Kabupaten Mojokerto	Rp.2.695.000,00
6.	Kabupaten Malang	Rp.1.962.000,00
7.	Kota Malang	Rp.1.882.250,00
8.	Kota Batu	Rp.1.817.000,00
9.	Kabupaten Jombang	Rp.1.725.000,00
10.	Kabupaten Tuban	Rp.1.575.500,00
11.	Kota Pasuruan	Rp.1.575.000,00
12.	Kabupaten Probolinggo	Rp.1.556.800,00
13..	Kabupaten Jember	Rp.1.460.500,00
14.	Kota Probolinggo	Rp.1.437.500,00
15.	Kota Mojokerto	Rp.1.426.000,00
16.	Kabupaten Banyuwangi	Rp.1.410.000,00
17.	Kabupaten Lamongan	Rp.1.339.750,00
18.	Kota Kediri	Rp.1.311.000,00
19.	Kabupaten Bojonegoro	Rp.1.305.250,00
20.	Kabupaten Lumajang	Rp.1.288.000,00
21.	Kabupaten Tulungagung	Rp.1.275.050,00
22.	Kabupaten Bondowoso	Rp.1.270.750,00
23.	Kabupaten Bangkalan	Rp.1.267.300,00
24.	Kabupaten Kediri	Rp.1.265.000,00
25.	Kabupaten Nganjuk	Rp.1.265.000,00
26.	Kabupaten Blitar	Rp.1.260.000,00
27.	Kabupaten Sumenep	Rp.1.253.500,00
28.	Kota Blitar	Rp.1.250.000,00
29.	Kota Madiun	Rp.1.250.000,00
30.	Kabupaten Sampang	Rp.1.243.200,00
31.	Kabupaten Situbondo	Rp.1.231.650,00
32.	Kabupaten Pamekasan	Rp.1.209.900,00
33.	Kabupaten Madiun	Rp.1.201.750,00
34.	Kabupaten Ngawi	Rp.1.196.000,00
35.	Kabupaten Trenggalek	Rp.1.150.000,00
36.	Kabupaten Ponorogo	Rp.1.150.000,00
37.	Kabupaten Pacitan	Rp.1.150.000,00
38.	Kabupaten Magetan	Rp.1.150.000,00

Sumber: Pergub Jatim, 2014

Dari tabel diatas terlihat Kota Madiun merupakan daerah dengan tingkat upah minimum tertinggi sebesar Rp.1.250.000,00 diikuti oleh Kabupaten Madiun dengan tingkat upah minimum sebesar Rp. 1.201.750,00 dan Kabupaten Ngawi dengan tingkat upah minimum sebesar Rp.1.196.000,00. Sementara Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan mempunyai tingkat upah minimum sama yaitu sebesar Rp.1.150.000,00. Meski terjadi kenaikan tingkat upah minimum kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun setiap tahunnya, tapi tingkat upah minimum kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Madiun masih sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa timur, bahkan beberapa diantaranya merupakan yang terendah di Provinsi Jawa Timur. Dengan rendahnya tingkat upah minimum di wilayah Eks Karesidenan Madiun akan membuat daya beli masyarakat juga rendah, sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Madiun.